



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PEMBATANG
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

YESI GUSTINA

NIM. 11627204103

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi"* yang ditulis oleh:

Nama : YESI GUSTINA

NIM :11627204103

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

Lysa Angravni, SH., MH.
NIP. 197901312006042003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PEMBATANG
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nama Panulis : YESI GUSTINA
NIM : 11627204103
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru, 2020
Tim Penguji

1. Irdaus, SH, MH
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Roni Kurniawan, SH., MH
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Hj. Nuraini Sahu, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Lovelly Dwina Daheh, SH., MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yesi Gustina, (2020): "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi".

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam basis data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Permasalahan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai kevalidan data kelayakan peserta penerima PKH. Banyak masyarakat yang mempersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kriteria penerima bantuan PKH namun tidak terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Perumusan masalah dalam penelitian ini ialah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dan teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara serta angket. Dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah, dan menuju kepada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum terlaksana secara maksimal karena masih ada masyarakat miskin serta mempunyai komponen tidak terdaftar sebagai peserta penerima manfaat PKH bahkan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT), dan juga ditemukan peserta yang menerima bantuan PKH dinilai dari keluarga mampu. Sehingga terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan PKH di desa Pematang dinilai belum sesuai dengan maksud dan tujuan program serta sasaran bantuan berdasarkan Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan yaitu belum terdapat koordinasi yang baik mengenai pengelolaan data sasaran program keluarga harapan, kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk pendamping program keluarga harapan dan kurangnya fasilitas sebagai penunjang kinerja tim pelaksana program keluarga harapan di desa Pematang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, kasih sayang, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat sekarang ini.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Darwis dan Ibunda Asniwati serta saudara penulis kakanda Zul fadli dan adinda Dio saputra. Beserta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu berkorban baik jiwa dan raga, moril dan materil untuk selalu mencintai dan memperjuangkan penulis agar selalu menjadi orang yang berguna bagi Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara serta selalu memberikan nasehat dan motivasi agar selalu sukses dunia terlebih akhirat.

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, dan III.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Firdaus, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Bapak Asril, S.Hi. MH selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.

Ibu Lysa Anggraini, SH. MH selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada adinda sehingga adinda dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan baik.

Bapak dan Ibu dosen serta semua civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk adinda selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016 terkhusus Ilmu Hukum B serta teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Geringging Jaya yang telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah segala kemuliaan dan kebesaran, serta selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat membantu bagi yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, April 2020

Penulis

YESI GUSTINA
NIM : 11627204103

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kabupaten Kuantan Singingi	20
B. Kecamatan Pangean	22
C. Desa Pematang	23
D. Kondisi Sosial Desa Pematang.....	24
E. Kondisi Ekonomi Desa Pematang.....	27
F. Pemerintahan Desa Pematang	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Negara Hukum Kesejahteraan (<i>welfare state</i>).....	31
B. Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Publik dan <i>freies ermessen</i>	37
C. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

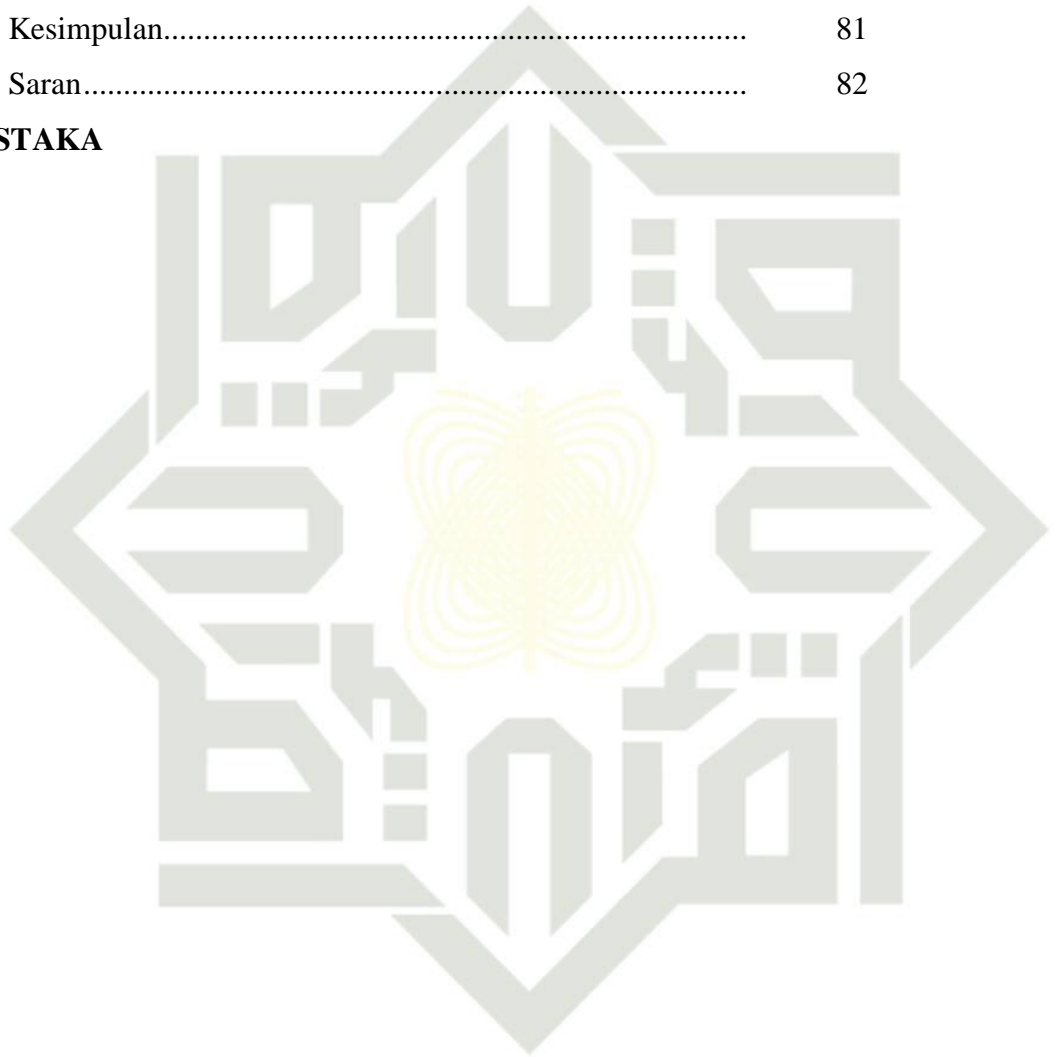
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pembatang Kecamatan Pangean.....	70
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

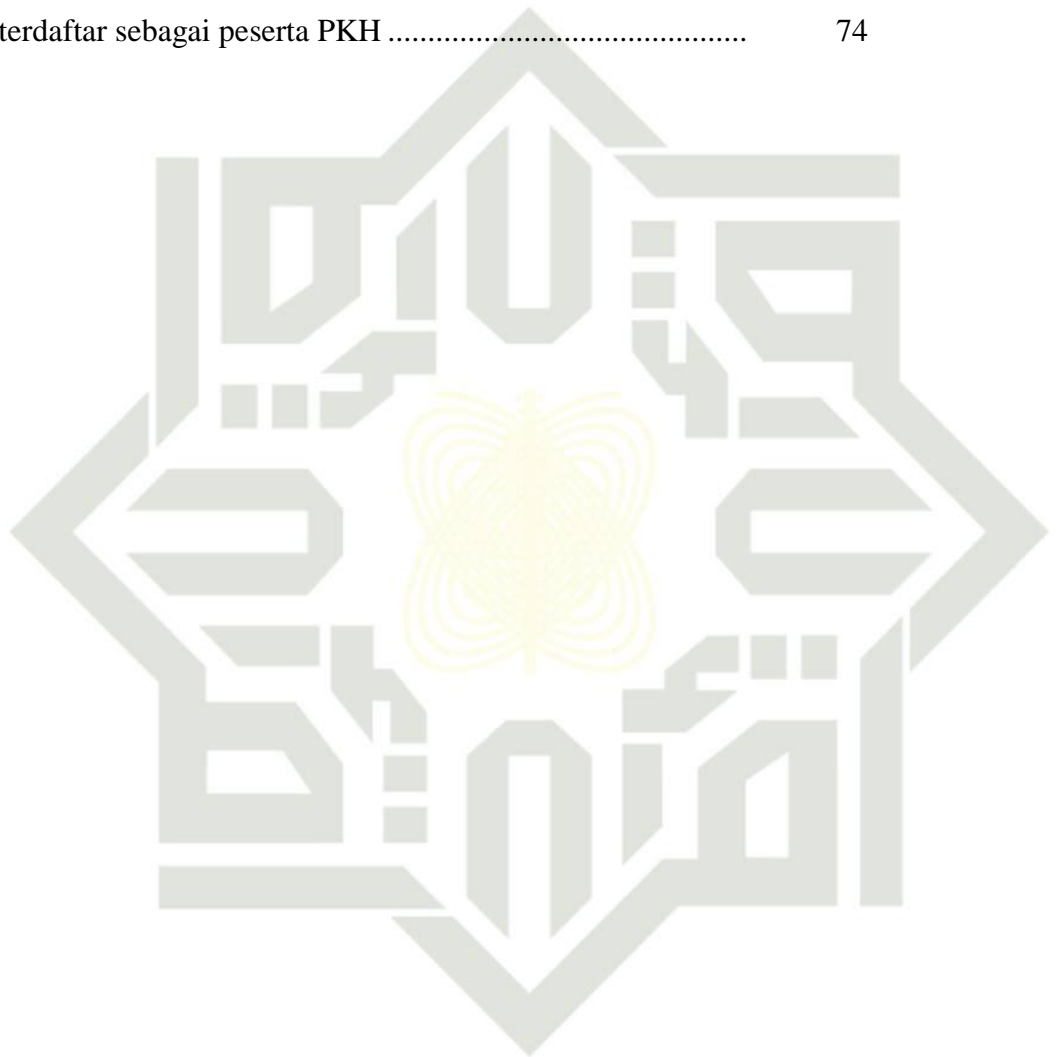
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel.....	14
Tabel II.1	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	24
Tabel II.2	Jumlah sarana pendidikan Desa Pematang	25
Tabel II.3	Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan di Desa Pematang	25
Tabel II.4	Jumlah masyarakat berdasarkan mata pencaharian	28
Tabel II.5	Jumlah lembaga/kelompok kemasyarakatan Desa pematang	29
Tabel IV.1	Jumlah Peserta PKH Desa Pematang <i>final closing</i> Tahun 2020	59
Tabel IV.2	Indeks Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun	61
Tabel IV.3	Pengetahuan masyarakat tentang PKH di Desa Pematang	62
Tabel IV.4	Sumber informasi masyarakat mengetahui tentang PKH....	62
Tabel IV.5	Pemahaman masyarakat terkait informasi yang diperoleh mengenai PKH.....	63
Tabel IV.6	Tanggapan masyarakat terhadap informasi PKH	64
Tabel IV.7	Pengetahuan masyarakat mengenai adanya tim pelaksana PKH untuk menginformasikan PKH di desa Pematang	64
Tabel IV.8	Pemahaman masyarakat tentang tujuan dari PKH	65
Tabel IV.9	Tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Pematang	65
Tabel IV.10	Tanggapan responden mengenai kelanjutan Program keluarga Harapan di Desa Pematang	66
Tabel IV.11	Tanggapan responden tentang Program Keluarga Harapan dapat membantu kebutuhan masyarakat.....	67
Tabel IV.12	Tanggapan responden tentang perangkat desa dan tim pelaksana PKH dalam menjalankan tugasnya	68
Tabel IV.13	Tanggapan responden tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fabel IV.14	Pemilihan peserta PKH di Desa Pematang.....	73
Fabel IV.15	Pendapat masyarakat terhadap tepat atau tidaknya menjadi peserta PKH.....	73
Fabel IV.16	Pengetahuan responden tentang masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapat bantuan PKH namun terdaftar sebagai peserta PKH	74



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechtsstaat* tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam artian *Welfare state*, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai manifestasinya pemerintah sejak kurun waktu 25 tahun hingga sekarang tidak saja menyelenggarakan pemerintahan secara rutin, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan secara konseptual dan konsisten melalui tahapan-tahapan.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bentuk peraturan perundangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara yang berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik ditingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Dan juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara dengan warga negara. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya.²

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-IV menyebutkan: "...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah

¹ Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002. h.1

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006. h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara Indonesia yang *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...*”.

Landasan tersebut menegaskan bahwa adanya “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi dan melayani segenap kepentingan publik, guna terwujudnya kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.³

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.⁴

Kemiskinan merupakan konsekuensi ataupun akibat dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sikap negara terhadap masyarakat miskin diatur dalam undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur sikap negara terhadap masyarakat miskin adalah UUD 1945 Pasal 34 ayat 1. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah tengah masyarakat, khususnya dinegara berkembang seperti Indonesia.

³Luthfi Kurniawan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara pers: Malang, 2016. h. 61

⁴Situmeang Firman, “Menyoal UUD 1945 Pasal 34 ayat 1”, <https://www.kompasiana.com/situmeangfirman/570293f3c3afbd40934b888/menyoal-uud-1945-pasal-34-ayat-1>, (diakses pada 24 november 2019, pukul 21.30).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Karena permasalahan kemiskinan sudah sering dikaji dan dicari solusi untuk mengatasinya namun sampai saat ini belum juga teratasi secara maksimal.⁵

Kesejahteraan Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: *“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”*.

Berbicara tentang kesejahteraan tidak terlepas dari hak dan kewajiban, ada hak yang harus diperjuangkan dan ada kewajiban yang harus di tuntaskan. Dalam hukum hak asasi manusia terdapat hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak asasi manusia yang mempresentasikan manusia sebagai makhluk yang mampu berkarya dan membutuhkan perangkat tertentu untuk dapat *survive* dalam kelanjutan kehidupannya. Vierdag mengkategorikan hak ekosop sebagai hak positif (*positive rights*), karena untuk merealisasikan hak-hak tersebut, peran aktif negara sangat dibutuhkan sehingga dalam merumuskan hak-hak ekosob menggunakan istilah *right to* (berhak atas).⁶

Pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sesuai Undang-undang

⁵ Sutyastie Soemitro Remi, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, Jakarta: PT Eneka Cipta, 2002. h. 1

⁶ Lysa Angraini, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016. h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik, pemerintah daerah dapat membentuk komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.⁷

Untuk terlaksananya pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mendorong berjalannya kebijakan-kebijakan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah, aspirasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang ada.⁸

Pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan meminimalisir permasalahan kesejahteraan di Indonesia, melalui kementerian sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program

⁷ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2018. h. 167

⁸ *Ibid*, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat dasar dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya PKH diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku penerima PKH menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan.

Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan program keluarga harapan, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin. Program keluarga harapan membantu mengurangi beban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan.

Sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kriteria komponen kesehatan meliputi:

1. Ibu hamil/menyusui
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kriteria komponen pendidikan meliputi:

1. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat.
2. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
3. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

1. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Harapan Tahun 2019. Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen. Bantuan tetap keluarga setiap tahun adalah Rp.550.000; dan PKH akses Rp.1.000.000. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa pertahun terdiri dari Ibu hamil Rp.2.400.000, Anak usia dini 0-6 tahun Rp.2.400.000, SD/ sederajat Rp.900.000, SMP/ sederajat Rp.1.500.000, SMA/ sederajat Rp.2.000.000, Penyandang Disabilitas Berat Rp.2.400.000, Lanjut Usia 60 tahun ke atas Rp.2.400.000. Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni bulan Januari, April, Juli, Oktober.

Dinas sosial yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pelaksanaan program pelayanan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) secara adil, jujur, dan merata. Dan dibantu oleh pelaksana PKH pusat dan daerah yang bertugas menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.

Pada tingkat pemerintah daerah, banyak kasus dapat dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten gagal menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana dirumuskan secara ideal dalam undang-undang yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing.⁹

Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan satuan-satuan pemerintah untuk melayani masyarakat. Pembangunan dan kebijakan akan

⁹ Abu Samah, *Hukum Kebijakan Publik*, Pekanbaru, 2018. h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terarah apabila otonomi daerah terealisasi dengan baik dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat.¹⁰

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Pembangunan Desa harus terarah dan terpadu, diselenggarakan berdasarkan aturan dan ketentuan atau pedoman-pedoman tertentu.¹¹

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹²

Ditingkat kecamatan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan PKH adalah pendamping PKH yang turun langsung ke Desa-desa untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH. Dengan adanya pendamping PKH ini, diharapkan untuk dapat memperhatikan komponen-komponen penerima PKH dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dianggap layak untuk menerima bantuan PKH sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat memperoleh hak nya.

Layaknya implementasi kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat memiliki

¹⁰ Luthfi Kurniawan, *Hukum dan Kebijakan Publik, Op Cit*, h. 104

¹¹ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi – dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991. h. 3

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015. h. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang dihadapi diantaranya kevalidan data penerima PKH dan besaran bantuan yang diterima. Masyarakat mengeluhkan banyak peserta yang layak mendapat program ini tapi tidak terdata sebagai penerima PKH. Selain itu, ada juga indikasi adanya pemotongan penyaluran bantuan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan.

Permasalahan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai kevalidan data kelayakan peserta penerima PKH. Banyak masyarakat yang mempersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kriteria penerima bantuan PKH namun tidak terdata dalam peserta penerima bantuan PKH. Artinya, pendataan program ini belum tepat sasaran.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing”**.

Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas tentang sasaran penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean berdasarkan Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut:

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga harapan.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana program keluarga harapan.
- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologis hukum, yaitu metode penelitian hukum yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pematang, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih tempat penelitian tersebut ialah mengingat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial, sehingga pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan atau program pengentasan kemiskinan yaitu program keluarga harapan. Setelah diadakan pengamatan langsung di Desa Pematang banyak terjadi permasalahan tentang kevalitan data peserta penerima manfaat PKH, sehingga dinilai tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Dan banyaknya keluhan dari masyarakat

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018, cet.10. h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menilai bantuan PKH tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dan seluruh pegawai dan staff, Pelaksana PKH Kecamatan Pangean, dan Masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Pematang. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁴

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi terlampaui besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi tersebut.¹⁵

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, cet.5. h. 121

¹⁵ *Ibid.* h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Jumlah		Persentase Sampel	Metode Sampel
		Populasi	Sampel		
1.	Dinas sosial Kab. Kuantan Singingi	30	6	20%	Purposive sampling
2.	Pendamping sosial PKH Kec. Pangean	6	2	33%	Purposive sampling
3.	Koordinator PKH Kab. Kuantan Singingi	1	1	100%	Purposive sampling
4.	Kepala Desa Pematang	1	1	100%	Total sampling
5.	Masyarakat Desa Pematang (KK)	213	106	50%	Random sampling
Jumlah		206	88		

Jumlah populasi pada Dinas Sosial diambil dari keseluruhan jumlah staf yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dan pengambilan sampel berdasarkan jumlah staf yang ada di Bidang Jaminan Sosial, Bencana Dan Rehabilitasi Sosial yang membidangi program keluarga harapan (PKH). Dan populasi pada pendamping sosial PKH Kecamatan Pangean berdasarkan jumlah tim pelaksana PKH tingkat kecamatan yakni berjumlah 6 (enam) orang pendamping, yang terdiri atas satu orang Koordinator Kecamatan dan lima orang Pendamping sosial lapangan, dan sampel diambil dari satu pendamping sosial Desa Pematang dan Koordinator Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas pendamping sosial berkoordinasi dengan Koordinator Kecamatan kemudian Koordinator Kecamatan berkoordinasi kepada Koordinator Kabupaten. Kemudian untuk populasi masyarakat diambil dari jumlah seluruh KK yang ada di Desa Pematang dan pengambilan sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode random sampling yang terdiri dari masyarakat yang merupakan peserta PKH dan masyarakat yang bukan peserta PKH, tujuannya disini untuk mengetahui pendapat masyarakat secara keseluruhan mengenai pelaksanaan PKH di Desa Pematang melalui data Angket.

Sumber data dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu :¹⁶

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

¹⁶ Zainudin Ali, *Op Cit*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar cara untuk mendapatkan data-data yang tepat dan lengkap. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:¹⁷

a. Observasi

Metode Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subyek dan obyek kajian.

b. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Metode ini ditujukan kepada sampel dan merupakan metode yang paling penting dan utama bagi penelitian ini untuk mendapatkan informasi langsung dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Angket

Yaitu penulis membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada masyarakat Desa Pematang dengan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditetapkan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti.

d. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, laporan, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum dari Program Keluarga Harapan di Desa Pematang atau objek yang diteliti dan berupa dokumentasi lainnya.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasa tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab yang memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran umum lokasi penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari: Geografis dan Demografis, Pendidikan, Agama, Sosial Ekonomi dan Pekerjaan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi pelaksanaan, dan dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab yang memuat uraian bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean serta faktor yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V: Penutup

Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi juga disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau (rantau nan tigo jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan adat istiadat serta bahasa minangkabau. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Indragiri Hulu Dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Setelah dilakukan pemekaran wilayah, Kuantan Singingi sekarang berada di kabupaten kuantan singing (Kuansing) yang ber Ibukota Teluk Kuantan. Daerah ini ini lebih dikenal dengan sebutan “ Rantau Kuantan” yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, Kuantan Hilir dan Kecamatan Cerenti. Namun sekarang sudah dimekarkan menjadi 15 kecamatan, dan salah satunya kecamatan pangean.

Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu kota Teluk Kuantan secara geografis terletak di jalur tengah lintas Sumatera dan berada di bagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelabuhan kuala Enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum , perdagangan dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0°00-1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 Bujur Timur.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan sebagai berikut:¹⁸

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Singingi
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Kuantan Hilir
5. Kecamatan Cerenti
6. Kecamatan Benai
7. Kecamatan Pangenss
8. Kecamatan Hulu Kuantan
9. Kecamatan Gunung Toar
10. Kecamatan Singingi Hilir
11. Kecamatan Logas Tanah Darat
12. Kecamatan Inuman
13. Kecamatan Sentajo Raya
14. Kecamatan Hilir Seberang
15. Kecamatan Pucuk Rantau

¹⁸ Bappedalitbang, *Profil Kabupaten Kuantan Singingi*, <https://bappedalitbang.kuantansing.go.id/id/contant.html> (Diakses Pada 18 Maret 2020, Pukul 17.20 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kecamatan Pangean

Kecamatan Pangean merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai luas wilayah 145,23 km² atau sekitar 1,9 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 20.718 jiwa yang terdiri dari 17 Desa. Ibukota Kecamatan Pangean adalah Pasarbaru yang mempunyai jarak Ibukota Kecamatan Pangean ke ibukota Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 31 km, Kecamatan Pangean mempunyai batas wilayah yaitu perbatasan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat. Berikut Desa yang ada di Kecamatan Pangean:¹⁹

1. Desa Pematang
2. Desa Padang Kunik
3. Desa Padang Tanggung
4. Desa Teluk Pauh
5. Desa Tanah Bekali
6. Desa Pulau Deras
7. Desa Pulau Kumpai
8. Desa Pulau Tengah
9. Desa Koto Tinggi Pangean
10. Desa Sukaping

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, *Kecamatan Pangean Dalam Angka*, M&N Grafika: Teluk Kuantan, 2018.h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Desa Pauh Angit
12. Desa Rawang Binjai
13. Desa Pulau Rengas
14. Desa Pasar Baru
15. Desa Sako
16. Desa Sungai Langsung
17. Desa Pauh Angit Hulu.

Desa Pematang

1. Sejarah Desa Pematang

Desa Pematang merupakan salah satu desa yang ada Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Pada mulanya Desa Pematang merupakan bagian dari Desa Padang Kunyit. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat dan beberapa tokoh pada masa itu, tepatnya pada tahun 1993 bersepakat untuk memisahkan diri dari desa induk dan membentuk desa baru yang diberi nama Pematang. Adapun nama Pematang sendiri dipilih dikarenakan letak geografis desa yang sebagiannya merupakan dataran tinggi, dan menurut bahasa setempat Pematang sendiri berarti Dataran Tinggi.²⁰

2. Luas wilayah Desa

Desa Pematang adalah Desa yang terletak di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pemukiman 2360 Ha,

²⁰ Jarman Idris, Kepala Desa Pematang, Wawancara, Teluk Kuantan, 16 Februari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian sawah 300 Ha, perkebunan 350 Ha, perkantoran 0,15 Ha, sekolah 1,5 Ha, jalan 65 Ha, lapangan sepak bola 1,5 Ha. Desa Pematang terdiri dari 3 (tiga) dusun, 6 (enam) RT.²¹

3. Jumlah penduduk

Tabel II.1
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa	Jumlah KK
550	516	1066	213

Sumber data: RPJM Desa Pematang 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 550 jiwa, perempuan berjumlah 516 jiwa dan total jumlah penduduk tersebut yaitu 1066 jiwa dan berjumlah 213 KK. Perkembangan penduduk di desa Pematang bisa dikatakan pesat sehingga membuat Indonesia memiliki persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Salah satu cara yang di lakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

D. Kondisi Sosial Desa Pematang

1. Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat, pendidikan perlu di tunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan yang berupa gedung-gedung sekolah yang ada di wilayah Desa

²¹RPJM Desa Pematang Tahun 2016-2021, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemabatang Kecamatan Pangean mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP sederajat telah tersedia, yang di bangun oleh pemerintah. Dalam pembangunan sarana pendidikan ini tidak hanya dengan beberapa kali saja, namun hal itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk melihat keadaan pendidikan masyarakat Pembatang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, perhatikan tabel berikut:²²

Tabel II.2
Jumlah sarana pendidikan Desa Pembatang

No	Lembaga pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	1
2.	SD/MI	1
3.	SLTP/MTS	1

Sumber data: RPJM Desa Pembatang 2016-2021

Tabel II.3
Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan di Desa Pembatang

No	Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	23 orang
2.	SD/MI	117 orang
3.	SLTP/MTS	97 orang
4.	SLTA/MA	124 orang
5.	S1/Diploma	31 orang
6.	Putus sekolah	53 orang
7.	Buta huruf	96 orang

Sumber data: RPJM Desa Pembatang 2016-2021

2. Kesehatan

Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi warga negaranya untuk semua lapisan. POSKESDES sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau baik

²² Ibid, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah maupun biaya. Dalam data RPJM Desa Pematang di uraikan sebagai berikut:

a. Jumlah kematian bayi

- Jumlah bayi lahir : 4 orang
- Jumlah bayi meninggal : - orang

b. Jumlah kematian ibu melahirkan

- Jumlah ibu melahirkan : 4 orang
- Jumlah ibu meninggal dalam melahirkan : - orang

c. Cakupan imunisasi

- Imunisasi polio : 17 orang
- Imunisasi DPT-1 : 11 orang
- Imunisasi cacar : 23 orang

d. Gizi Balita

- Jumlah balita : 24 orang
- Balita gizi buruk : - orang
- Balita gizi baik : 24 orang
- Balita gizi kurang : - orang

e. Pemenuhan air bersih

- Penggunaan sumur galian : 135 KK
- Pengguna air PAM : - KK
- Pengguna sumur pompa : - KK
- Pengguna sumur hidran umum : - KK
- Pengguna air sungai : 135 KK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia, kebebasan beragama di Republik Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29 yaitu toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampuri aliran kepercayaan. Secara keseluruhan masyarakat Desa Pematang adalah beragama Islam dengan fasilitas ibadah Masjid 1 buah dan Musholah 8 buah.

Kondisi Ekonomi Desa Pematang

1. Mata pencaharian

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat khususnya Desa Pematang yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk bertani dan berkebun.²³

Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Desa Pematang yang menjadi petani dan berkebun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pematang mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat. Masyarakat Desa Pematang mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam seperti petani, pedagang, PNS, guru, bidan/perawat, pensiunan,

²³ *Ibid*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruh, jasa persewahan, TNI/POLRI, peternak, sopir, tukang jahit, wiraswasta, pertukangan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Jumlah masyarakat berdasarkan mata pencaharian

No	Mata pencarian	Jumlah
1.	Petani	665
2.	Pedagang	9
3.	PNS	23
4.	Tukang	12
5.	Guru	28
6.	Bidan/perawat	2
7.	TNI/polri	-
8.	Pensiunan	5
9.	Sopir	8
10.	Buruh	-
11.	Jasa persewahan	-
12.	Swasta	45
13.	Peternak	-

Sumber data: RPJM Desa Pematang 2016-2021

F. Pemerintahan Desa Pematang

1. Struktur organisasi Desa

Desa Pematang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dan kepala dusun yang semuanya bekerja sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang telah di pangkunya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada bagan di bawah ini tentang struktur organisasi Desa Pematang:

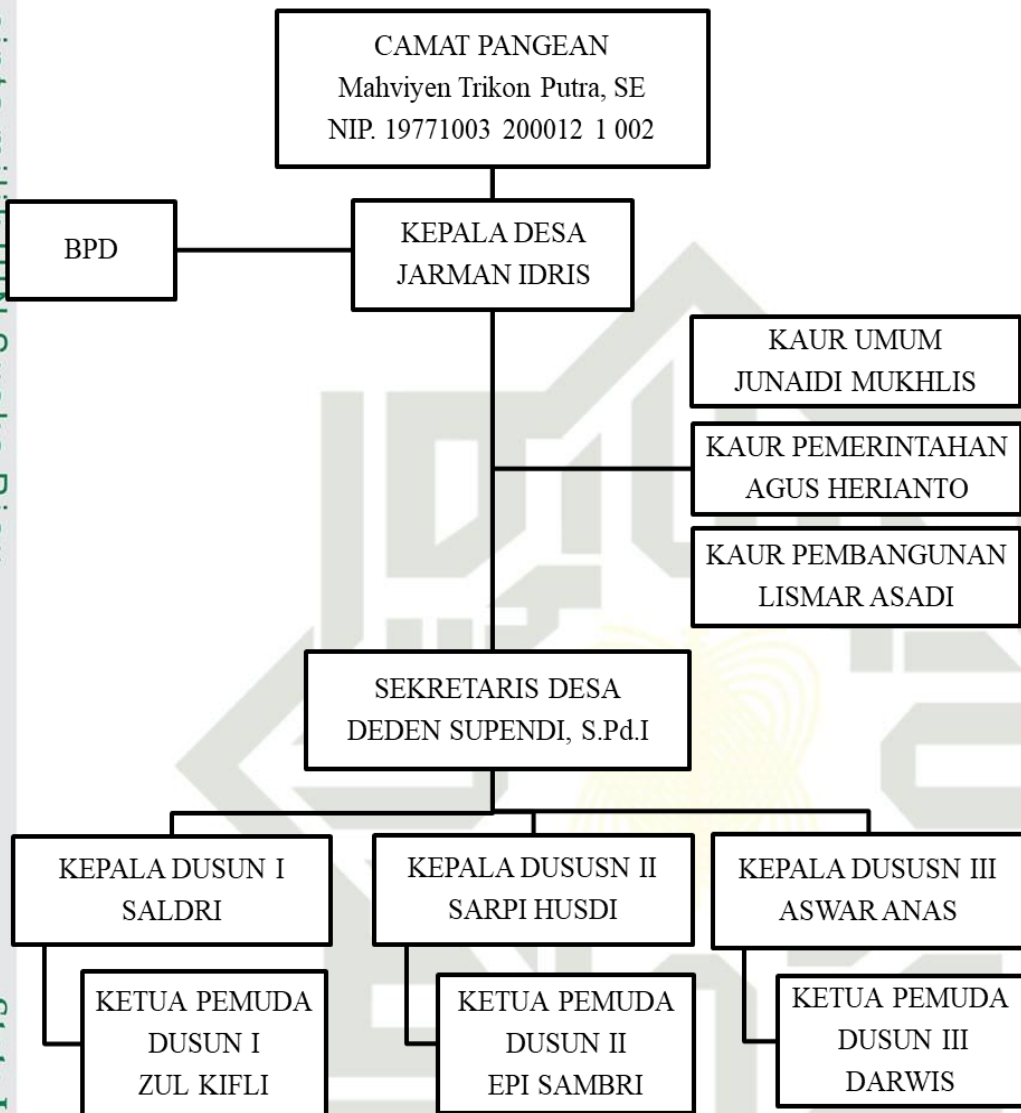
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Lembaga kemasyarakatan Desa

Tabel II.5

Jumlah lembaga/kelompok kemasyarakatan Desa pematang

No	Nama lembaga/kelompok	Jumlah
1.	LPM	1
2.	PKK	1
3.	Posyandu	1
4.	Pengajian	4
5.	Arisan	3
6.	Simpan pinjam	5
7.	Kelompok tani	3
8.	Karang taruna	1

Sumber data: RPJM Desa Pematang 2016-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pematang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:²⁴

- a. Indra : Ketua
- b. Wen PurtaWadi : Wakil Ketua
- c. Ardius : Bendahara
- d. Himron Saheman : Anggota
- e. Dawaris : Anggota

4. Visi dan Misi Desa Pematang

Visi : Bersatu membangun Desa Pematang yang lebih maju.

Misi :

- a. Bersatu bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal.
- b. Bersatu bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif;
- c. Bersatu bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan desa pematang yang aman, tentram dan damai;
- d. Bersatu bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

²⁴ Ibid, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*)

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizen*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik.²⁵

Konsep kesejahteraan (*welfare*) yang sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thomson (2005), Suharto (2005), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna, yaitu sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Sebagai pelayanan sosial, pada umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social service*). Sebagai tunjangan sosial, diberikan kepada orang miskin.

²⁵ Dinno Jonhadi, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2014, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*socialillfare*” ketimbang “*social welfare*”.

Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang banyak mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).²⁶

Dalam batang tubuh UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) serta Indonesia berdasarkan konstitusional. Jika dikaitkan dengan ruang lingkup tugas pemerintah maka filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip

²⁶ *Ibid*, h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara hukum yang dinamis atau *welfare* (negara kesejahteraan), sebab Negara wajib menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Pernyataan ini dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke Empat yang antara lain memuat empat tujuan Negara yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia, 2) mencerdaskan kehidupan bangsa, 3) melindungi kesejahteraan umum, 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁷

Sila kelima dalam pancasila juga tercantum dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 menegaskan prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” begitu juga tuntutan pada pasal 34 UUD 1945 mengharuskan pemerintah untuk menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sehingga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas membangun kesejahteraan sosial itu.²⁸

Bernhard Limbong mengemukakan dua pengertian Negara Hukum yaitu, Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan Negara hukum dalam arti materil. Negara hukum dalam arti formal adalah Negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan dalam hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang

²⁷ *Ibid*, h. 52

²⁸ *Ibid*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire laiesizealler*. Sedangkan Negara hukum dalam arti materil (luas atau modern), yaitu Negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindungi.²⁹

Teori *welfare state* secara maknawi adalah negara hukum kesejahteraan yang dijadikan sebagai *grand theory analisis*. Hal ini sesuai dengan problematika yuridis yang berkorelasi dengan pengembangan konsep serta seputar dikursus tentang hukum kebijakan pelayanan publik. Dalam konstitusi negara Indonesia juga menegaskan secara tersirat di dalamnya tentang konsep negara hukum. Sejatinya, konsep negara hukum kesejahteraan menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin tentang kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat, yang salah satunya adalah hak rakyat atas pelayanann dan keterbukaan akses informasi terhadap publik.³⁰

Konsep negara hukum kesejahteraan atau *welfare state* pada dasarnya muncul sebagai antitesa tipe negara hukum sebelumnya, yaitu konsep Negara “penjaga malam” atau “*nachwachterstaat*”. Dalam perkembangan negara sebagai “penjaga malam”, muncul gejala kapitalisme di ranah perekonomian

²⁹ Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Cet. Ke-1, h. 2-3

³⁰ Luthfi Kurniawan, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, *Op Cit*, h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang kian menunjukkan kecenderungan yang semakin menajam, yang sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal. Kenyataan ini kemudian mendorong munculnya sebuah kesadaran baru mengenai pentingnya adanya keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan ini. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu turut campur dalam mengatur sumber-sumber kemakmuran agar tidak dikuasai oleh segelintir orang.³¹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, negara diuntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara *intervensionis* pada ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.

Dalam negara hukum kesejahteraan, tugas negara atau pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas, sehingga kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat Negara juga menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak

³¹ *Ibid*, h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dimana peraturannya belum ada. Maka dalam hal demikian administrasi negara dipaksa bertindak cepat, tidak dapat menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif.³²

Berdasarkan pada pejabaran mengenai konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa prinsip pokok yang terkandung di dalam konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), sebagai berikut: (1) Bahwa prinsip dalam negara hukum kesejahteraan, memandang tentang sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* sudah tidak relevan lagi. Pertimbangan-pertimbangan efesiensi lebih penting dari pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut kepentingan politis sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ-organ legislatif, (2) Bahwa peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum dan kepentingan lainnya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), (3) Bahwa *welfare state* merupakan negara hukum materil yang mengutamakan keadilan sosial dan bukan persamaan formil, (4) Bahwa dalam konsep *welfare state*, hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial yang berarti adanya batas-batas dalam kebebasan penggunaannya, (5) Bahwa dalam konsep *welfare state*,

³² *Ibid*, h. 64-65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran hukum publik semakin penting dan semakin mendesak keberadaannya dari pada hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan dan lain seagainya.³³

B. Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Publik Dan *Freies Ermessen*

Secara bahasa *Freies Ermessen*, *Frei* artinya: bebas, merdeka, tidak terikat, *Ermessen* artinya: menilai, memperimbangkan sesuatu. *Freies Ermessen* yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan kepentingan umum., kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya tanpa persetujuan lebih dahulu dari legislatif. Seperti memberi izin, melakukan pencabutan hak (*onteigening*) mendirikan rumah sakit, sekolah, perusahaan dan sebagainya, tercakup dalam arti *Freies Ermessen* ini ialah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada peraturannya, atau mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataan. Pencakupan yang demikian disebut (*discretionary power*).

Adanya *freies ermessen* ini mempunyai konsekuensi tersendiri di bidang peraturan perundang-undangan, yakni adanya penyerahan kekuasaan legislatif kepada pemerintah sehingga dalam keadaan tertentu atau dalam porsi dan tingkat tertentu pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundangan (produk legislasi) tanpa persetujuan lebih dulu dari parlemen.³⁴

³³ *Ibid*, h. 67-68

³⁴ Dinno Jonhadi, *loc.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implikasi yang nyata dalam penyalahgunaan *freies ermesen* administrasi negara/pejabat tata usaha negara kemungkinan melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. *Freies ermesen* ini tidak boleh digunakan tanpa batas dan tidak boleh disalahgunakan, untuk itu unsur-unsur *freies ermesen* adalah:³⁵

1. Dilakukan untuk kepentingan umum/kesejahteraan umum.
2. Dilakukan atas inisiatif administrasi negara itu sendiri.
3. Untuk menyelesaikan masalah konkrit dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba.
4. Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum.

Freies ermesen dalam pelaksanaannya sangat dimungkinkan untuk terjadinya maladministrasi jika hal tersebut tidak dikawal dengan rambu-rambu pembatas, sekalipun kelahiran *freies ermesen* itu sendiri adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas dalam konsep Negara hukum. Adalah hal yang sangat ironis, jika dengan *freies ermesen* yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga masyarakat menuju kepada kesejahteraan justru menimbulkan masalah baru berupa kerugian akibat tindakan sewenang-wenang dengan mendasarkan pada pemikiran makna “kebebasan” yang diberikan oleh *freies ermesen* tersebut.³⁶

Hukum merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Berbagai definisi yang diberikan dan diuraikan tidak lain bertujuan untuk

³⁵ *Ibid*, h. 44

³⁶ Dyah Adriantini Shinta Dewi, “Pendayagunaan *Freies Ermessen* Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan”, Di Akses Pada 18 Maret 2020, Dari Jurnal: <http://jurnal.uns.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pemahaman seputar hakikat hukum dan kebijakan publik yang memiliki fokus yang sama yaitu pada nilai, tujuan, dan sarana. Salah satu sarana yang banyak dipilih adalah peraturan perundang-undangan, utamanya undang-undang yang dilegitimasi melalui pengesahan oleh DPR sehingga mempunyai sifat mengikat bagi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum pun mengandung nilai, konsep-konsep dan tujuan yang mana proses perwujudan ide dan tujuan merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga dipakai sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat hingga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik. *Constitutions, statutes, administrative orders and executive orders are indicators of policy* dimana alokasi penetapan tujuan merupakan *output* dari sistem politik yang dapat berupa alokasi nilai otoritatif sehingga dinyatakan sebagai kebijakan publik, selanjutnya akan diimplementasikan pada masyarakat sehingga nampak bahwa hukum merupakan indikator adanya kebijakan.

Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan ataupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Unsur-unsur mana yang harus diperhatikan agar hukum dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen (kebijakan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial.³⁷

Mengenai pelaksanaan (*implementation*) suatu kebijaksanaan, sesungguhnya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut dalam perumusan dan proses penetapannya. Namun perlu pula diketahui dengan baik, bagaimana pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah itu harus dilakukan. Dapat dikatakan, bahwa semua kebijaksanaan pemerintah itu barulah ada artinya, bila pelaksanaan kebijaksanaan itu dilakukan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan rakyat.

Peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik, akhirnya tidak menguntungkan masyarakat, malahan merugikan negara. Adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan, kolusi, apalagi korupsi, semuanya dapat merugikan rakyat yang akhirnya bermuara pada merugikan bangsa dan negara. Proses pelaksanaan kebijaksanaan (*policy implementation*) merupakan proses yang panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu karena penerapan (*application*) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat mempunyai sifat yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula.³⁸

Berkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai salah satu filter *freise ermessen*, keberadaannya menjadi hal sangat diperlukan, supaya *freies ermessen* tersebut tidak sia-sia tetapi justru bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai maksud yang diberikannya

³⁷ Luthfi Kurniawan, *op.cit.*, h. 34-35

³⁸ Suratmat, Hayat dan Umi Salamah, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), Cet. ke-1, h. 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan tersebut. Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam upaya memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, mengingat bahwa pada dasarnya pejabat adalah pelayanan masyarakat yang wajib memberikan pelayanan publik yang baik. Mengingat bahwa, yang dimaksud dengan pelayanan publik meliputi hal yang sangat luas, sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa :”pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” AUPB yang berawal dari hasil penelitian oleh komisis De’ Monchy tahun 1950 dan dilanjutkan oleh Komisi Vander Grinten tahun 1952 dengan istilah *Algemene Beginselen van Behorlijke Bestuur*. Indonesia telah mengadopsi sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas: 1) kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) ketidak berpihakan, 4) kecermatan, 5) tidak menyalahgunakan wewenang, 6) keterbukaan, 7) kepentingan umum, 8) pelayanan yang baik.

Hakikat dari kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai otoritas sebagai pembuat kebijakan untuk mengarahkan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu bagi kehidupan bersama dalam masyarakat, dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai jenjang/tingkat, baik provinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan pembentukan kebijakan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut. Dengan demikian, kebijakan publik diperlukan sebagai sarana untuk mendukung hukum agar penerapannya sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁹

Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat dengan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan sejak tahun 2007 oleh pemerintah Indonesia. Dari sisi kebijakan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) yang

³⁹ Luthfi Kurniawan, *op.cit.*, h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan keluarga. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam pasal 2 peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi peserta PKH. PKH bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih leluasa terhadap peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka. Perempuan justru dianggap lebih efektif dalam mengelola keuangan rumah tangga, sehingga kualitas kesehatan dan pendidikan penerima bantuan dapat ditingkatkan.

3. Syarat kepesertaan atau kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Syarat kepesertaan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai Peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Komponen PKH terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kriteria komponen kesehatan, yaitu:
 - 1) Ibu hamil atau menyusui;
 - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Kriteria komponen pendidikan, yaitu:
 - 1) Anak sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - 3) Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu:
 - 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Pengurus PKH adalah Ibu pengurus keluarga yang mengurus anak pada keluarga bersangkutan. Untuk pengurus keluarga dengan kondisi khusus, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika tidak ada ibu pengurus keluarga, maka wanita dewasa dari kerabat/keluarga yang mengurus anak keluarga tersebut seperti nenek/bibi/kakak perempuan dapat menjadi pengurus PKH.
- b. Jika tidak terdapat wanita dewasa dari kerabat/keluarga yang mengurus anak keluarga tersebut, pengurus PKH dapat digantikan oleh kepala keluarga atau wanita dewasa lain yang mampu mengurus anak keluarga tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Proses Penetapan Sasaran

Proses penetapan sasaran atau pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima manfaat berdasarkan ranking kemiskinan terendah. Penetapan lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui surat keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan. Setelah ditetapkannya sasaran penerima program keluarga harapan, kemudian dilakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan BDT dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari validasi ini adalah untuk memperoleh data calon peserta yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Marfinedi sebagai pendamping sosial PKH Desa Pematang.

Program keluarga harapan adalah bantuan tunai bersyarat, dimana setiap keluarga penerima manfaat harus mempunyai komponen yang ditetapkan dalam bantuan PKH, yaitu komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, minimal keluarga penerima manfaat mempunyai satu komponen diantara tiga komponen yang telah ditetapkan. Untuk menjadi peserta PKH tidak ada prosedur yang instan agar sebuah keluarga dapat langsung menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta PKH. Perlu di ketahui peserta PKH adalah keluarga miskin yang terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT). BDT adalah sumber data bantuan sosial. Maka dari itu data BDT di suatu daerah/Desa harus di mutakhirkan, salah satu caranya dengan Musdes/Muskel data kemiskinan. Dan yang menentukan calon peserta PKH adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Apabila ada penambahan jumlah peserta PKH, maka Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI langsung mengambil data calon KPM PKH dari data BDT. Selanjutnya calon KPM PKH tersebut di validasi oleh pendamping PKH.⁴⁰

Berikut proses atau alur data penetapan peserta bantuan program keluarga harapan. Pada tahun 2005 dilaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Pendataan tersebut bertujuan untuk mendata Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Data ini digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PKH. Pada tahun 2007 pilot proyek PKH dimulai di 7 Provinsi. Kemudian, pada tahun 2008 dilaksanakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Dan pada tahun 2011 data PPLS (data 40% menengah kebawah) oleh BPS diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dijadikan Basis Data Terpadu (BDT). BDT digunakan untuk berbagai

⁴⁰ Sisrianto, koordinator PKH kabupaten kuantan singing, wawancara, teluk kuantan, 27 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program bantuan dan program perlindungan sosial pada tahun 2012-2014. PKH dimulai pada tahun 2012 di Kabupaten Kuantan Singing.

Pada tahun 2015 BDT hasil PPLS 2011 di mutakhirkan oleh BPS melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan diserahkan ke kemensos melalui Pusdatin Kessos. Dan pada tahun 2016 pengelolaan data terpadu berada di bawah kemensos melalui pusdatin kessos untuk tanggung jawab pemutakhiran data terpadu di serahkan kepada daerah masing-masing. Kemudian di tahun 2017 dikembangkan aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk mengelola data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (DT PPFM dan OTM) untuk program PKH, Rastra, dan BPNT. Pada tahun 2019 perubahan nomenklatur dari DT PPFM dan OTM menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian data diperluas pengelolaan bukan cuma saja fakir miskin, tetapi juga meliputi Data Bansos, Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dan pada tahun 2019 mulai di perkenalkan SIKS-NG dengan platform android SIKS-Droid untuk memudahkan pendata melakukan verifikasi dan validasi data tanpa perlu mencetak prelist menggunakan kertas.⁴¹

5. Hak, kewajiban dan sanksi peserta PKH
 - a. Hak peserta PKH

Hak peserta PKH antara lain:

⁴¹ Sisrianto, koordinator PKH kabupaten Kuantan Singing, wawancara, Teluk Kuantan, 27 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mendapatkan bantuan sosial uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
 - 2) Mendapatkan pendampingan Program Keluarga Harapan.
 - 3) Mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga.
 - 4) Mendapatkan program komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- b. Kewajiban peserta PKH
- Kewajiban peserta PKH antara lain:
- 1) Kewajiban pada komponen kesehatan
 - a) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas.
 - b) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif.
 - c) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan desa bagi bayi dan balita.
 - 2) Kewajiban pada komponen pendidikan mendaftarkan anggota keluarga kedalam satuan pendidikan dan memastikan tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan sesuai dengan protokol pendidikan, seperti berikut:

- a) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- b) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka).
- c) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- d) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan, telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.
- 3) Kewajiban pada komponen kesejahteraan sosial
 - a) Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.
 - b) Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.
- 4) Kewajiban lain adalah menghadiri pertemuan rutin bulanan kelompok peserta PKH dan mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).
- c. Sanksi peserta PKH

Sanksi peserta PKH akan diberikan kepada peserta PKH apabila:

 - 1) Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku disetiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan.

- 2) Jika tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku disetiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapat bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
 - 3) Jika enam bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku disetiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen, meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
6. Tahapan penyaluran dana bantuan PKH

Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi, Subdit Kepesertaan, dan Subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan Terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Bantuan Sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

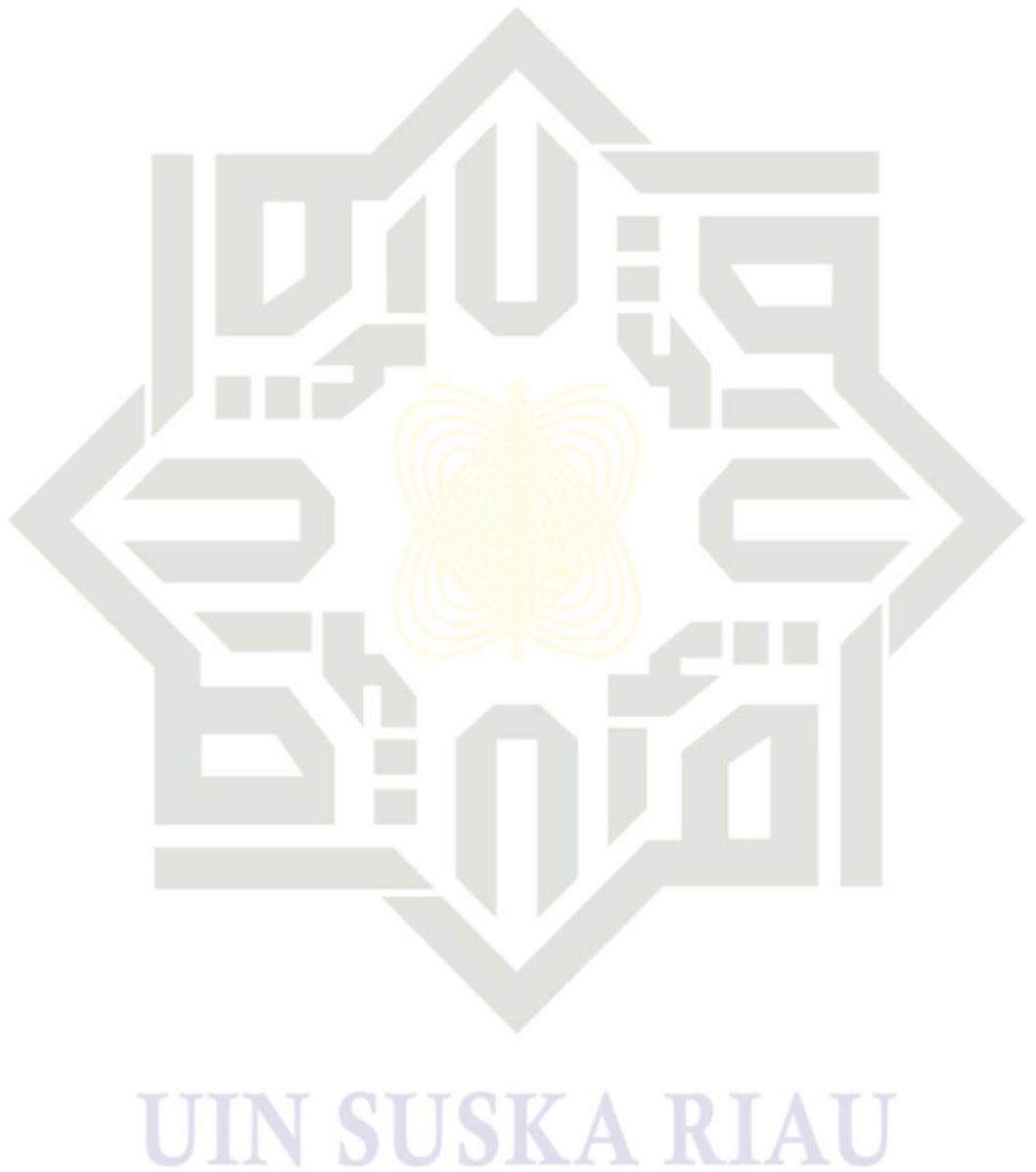
Sedangkan mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:

- a. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial
- b. Sosialisasi dan edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- e. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial

Berikut ini adalah tahapan penyaluran bantuan PKH:

- a. Peserta PKH Lama
 - 1) Bantuan diberikan kepada peserta PKH sebanyak 4 tahap dalam setahun.
 - 2) Khusus pada tahap II, selain mendapatkan bantuan berdasarkan komponen, peserta PKH juga mendapatkan bantuan tetap (namun di tahun 2020 bantuan tetap sudah ditiadakan).
- b. Peserta PKH Baru
 - 1) Bantuan pertama kali diberikan kepada peserta PKH pada penyaluran tahap IV yang dilakukan pada bulan November atau desember pada tahun berjalan.

- 2) Pada penyaluran bantuan tersebut, peserta PKH mendapatkan total nilai bantuan pertahun, baik bantuan tetap maupun bantuan komponen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (*Dass Sollen*) dengan pelaksanaannya dilapangan (*Dass Sein*) terjadi ketidak sesuaian. Dimana, dalam Pasal 3 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di jelaskan bahwa: “*Sasaran PKH merupakan keluarga atau seorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan*”. Namun dalam pelaksanaannya di desa Pematang, masih ada masyarakat miskin serta mempunyai komponen tidak terdaftar sebagai peserta penerima manfaat PKH bahkan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT), dan juga ditemukan peserta yang menerima bantuan PKH dinilai dari keluarga mampu. Sehingga terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan PKH di desa Pematang dinilai belum tepat sasaran.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu: belum terdapat koordinasi yang baik mengenai pengelolaan data sasaran program keluarga harapan, kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk pendamping program keluarga harapan dan

kurangnya fasilitas sebagai penunjang kinerja tim pelaksana program keluarga harapan di desa Pematang.

Saran

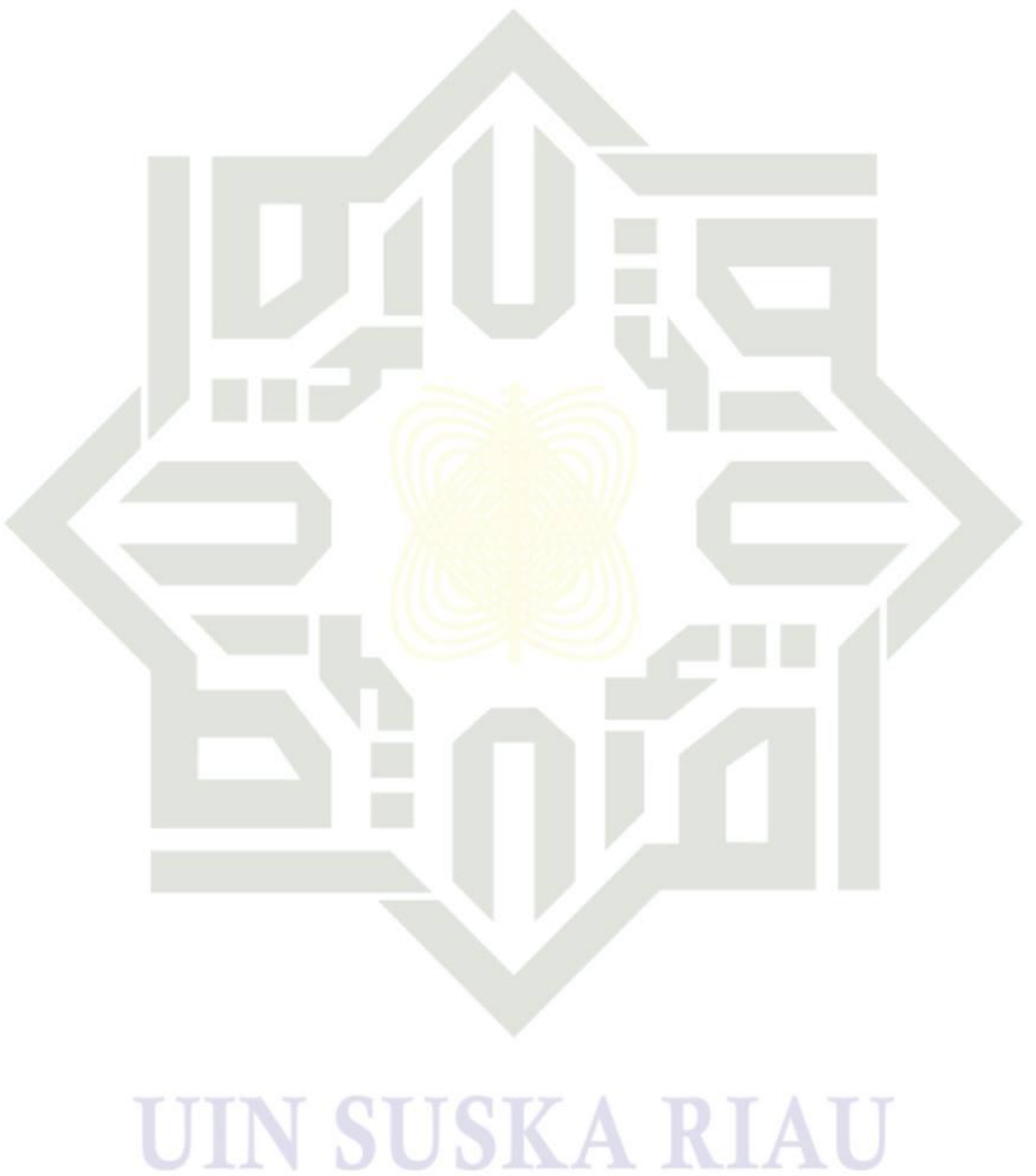
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, penulis ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Untuk tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan survei langsung pada proses validasi data dan pengawasan terkait data masyarakat yang menerima bantuan PKH, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan menjadi peserta dari PKH. Dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar dana bantuan PKH yang diterima digunakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari PKH.
2. Untuk kepala desa Pematang beserta perangkat perlu adanya evaluasi kinerja dalam memahami program-program yang diberikan pemerintah, khususnya pada Program Keluarga harapan (PKH), terutama dalam pendataan masyarakat miskin, sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan haknya. Dengan demikian dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat sesuai dengan tujuan program PKH.
3. Untuk masyarakat Desa Pematang diharapkan dapat bekerja sama dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dari program keluarga harapan dengan memberikan laporan ataupun pengaduan terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang PKH kepada tim pendamping PKH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Samah, *Hukum Kebijakan Publik*, Pekanbaru, 2018
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Pangean Dalam Angka, M&N Grafika: Teluk Kuantan, 2018
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, cet.5
- Bappedalitbang, Profil Kabupaten Kuantan Singingi, <https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/contant.html>
- Dinno Jonhadi, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2014
- Dyah Adriantini Shinta Dewi, “Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan” , Dari Jurnal: <http://jurnal.uns.ac.id>
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006
- Luthfi Kurniawan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara pers: Malang, 2016
- Nisa Angraini, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016. Hlm
- Nurmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.
- RPJM Desa Pematang Tahun 2016-2021
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016) Cet.Ke-1
- Situmeang Firman, “Menyoal UUD 1945 Pasal 34 ayat 1”, <https://www.kompasiana.com/situmeangfirman/570293f3c3afbdf40934b888/menyoal-uud-1945-pasal-34-ayat-1>
- Setyastie Soemitro Remi, *Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

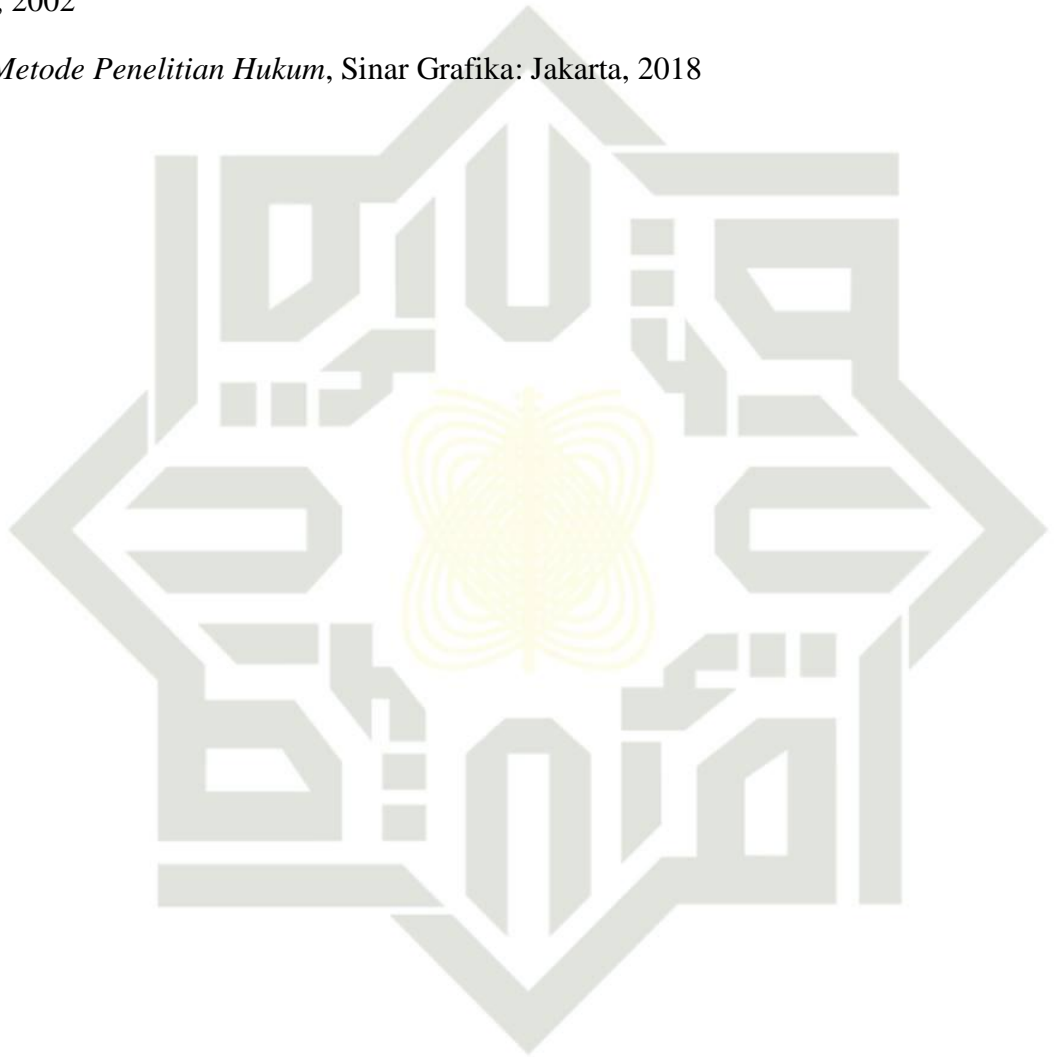
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suratmat, Hayat dan Umi Salamah, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi – dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991

Widjaja, *Pemerintahan Desa dan adminidtrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN
PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI DESA PEMBATANG KECAMATAN
PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No responden:

I. PENGANTAR KUESIONER

Kepada Yth: Bapak/Ibu

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian sarjana strata satu Ilmu Hukum, maka peneliti mohon dengan segala hormat kepada Bapak/ibu dapat membantu peneliti untuk mengisi angket yang telah di sediakan.

Angket ini ditujukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi berhubungan dengan penyusunan skripsi, maka dari itu informasi yang bapak/ibu berikan akan di rahasiakan. Peneliti berharap bapak/ibu memberikan jawaban yang sejujurnya dan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti. Untuk itu, atas perhatian dan bantuan bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Teluk Kuantan, 11
Februari 2020

Hormat peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. IDENTITAS PENELITI

Nama : Yesi gustina
 Nim : 11627204103
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jenjang pendidikan : S1

III. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Pendidikan terakhir :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak tamat SD
- b. SD
- c. SLTP/ sederajat

- d. SMA/ sederajat
- e. Diploma/ sarjana

5. Pekerjaan Anda :

- a. Petani
- b. Buruh
- c. Pedagang

- d. Ibu rumah tangga
- e. Lainnya (sebutkan):.....

6. Jumlah anak :

- a. 1 orang
- b. 2 orang
- c. 3 orang
- d. Lebih dari 3, sebutkan....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh alternatif jawabannya.
2. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai menurut ibu dan berikan tanda (**X**) pada jawaban yang menurut ibu benar.
3. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti atau ragu, tanyakan langsung kepada peneliti.
4. Peneliti sangat mengharapkan semua pertanyaan dijawab dengan benar dan jujur.

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN

A. Pemahaman masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan

1. Apakah ibu mengetahui tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Pembatang ?
 - a. Tahu
 - b. Kurang tahu
 - c. Tidak tahu
2. Dari mana ibu memperoleh informasi mengenai PKH ?
 - a. Pejabat desa/kecamatan
 - b. Tetangga/teman
 - c. Iklan/sosialisasi
3. Apakah informasi yang ibu peroleh dapat ibu pahami ?
 - a. Pahami
 - b. Kurang pahami
 - c. Tidak pahami
4. Bagaimana tanggapan ibu setelah memperoleh informasi mengenai adanya PKH ?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah ibu tahu adanya tim PKH untuk menginformasikan PKH di desa Pematang kecamatan Pangean ?
 - a. Tahu
 - b. Kurang tahu
 - c. Tidak tahu
6. Apakah ibu mengerti tentang tujuan dari PKH ?
 - a. Mengerti
 - b. Kurang mengerti
 - c. Tidak mengerti

B. Ketepatan sasaran dari Program Keluarga Harapan

1. Bagaimana penilaian ibu, apakah pemilihan peserta PKH di Desa Pematang sudah tepat sasaran ?
 - a. Tepat sasaran
 - b. Kurang tepat sasaran
 - c. Belum tepat sasaran
2. Apakah ibu merasa bahwa ibu merupakan salah satu orang yang tepat untuk terdaftar sebagai peserta PKH ?
 - a. Ya, sangat tepat
 - b. Kurang tepat
 - c. Tidak tepat
3. Apakah ibu pernah mengetahui ada peserta PKH yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan PKH namun terdaftar sebagai peserta PKH ?
 - a. Ya
 - b. Kurang tahu
 - c. Tidak

C. Pelaksanaan PKH

1. Menurut penilaian ibu apakah pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang berjalan dengan baik ?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak baik
2. Bagaimana tanggapan ibu tentang kelanjutan PKH di Desa Pematang ?
 - a. Setuju dilanjutkan
 - b. Kurang setuju dilanjutkan
 - c. Tidak setuju dilanjutkan
3. Menurut pengetahuan ibu apakah dengan adanya bantuan PKH dapat membantu kebutuhan masyarakat ?
 - a. Ya
 - b. Kurang
 - c. Tidak
4. Menurut ibu, apakah perangkat desa/petugas pelaksanaan PKH sudah menjalankan tugasnya dengan baik ?
 - a. Sudah baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik
5. Sejauh ini bagaimana tanggapan ibu tentang pelaksanaan PKH di Desa Pematang?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Kepala Desa Pematang Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi (16 Februari 2020)**



**Wawancara Bersama Kabid Jaminan Sosial, Bencana
Dan Rehabilitasi Sosial (27 Januari 2020)**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Koordinator PKH Kecamatan Pangean dan Koordinator PKH Kabupaten Kuantan Singingi (19 Februari 2020)



Wawancara bersama Pendamping Sosial PKH Desa Pematang (21 Februari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengikuti Pertemuan Rutin KPM dan Pendamping Sosial PKH Desa Pematang (24 Februari 2020)



Wawancara Bersama Masyarakat Desa Pematang Dan Pembagian Kuesioner Angket (20 Februari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Keluarga Nenek Oda, Salah Satu Keluarga Kurang Mampu Yang Tidak Terdaftar Dalam Basis Data Terpadu (22 Februari 2020)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/10107/2019

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: yesi gustina
NIM	: 11627204103
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas sosial dan ketenagakerjaan kabupaten kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di desa pembatang kecamatan pangean kabupaten kuantan Singingi provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan. terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29187
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1.107/2019 Tanggal 26 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : YESI GUSTINA
2. NIM / KTP : 11627204103
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PEMBATANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
7. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 09/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/ DPMPTSP/ NON IZIN-RISET/ 29187 Tanggal 26 Desember 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : YESI GUSTINA
NIM : 11627204103
Jurusan : ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PEMBATANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S, Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak
Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Website: <https://disospemdes.kuansing.go.id>
 E-mail: @disospemdes.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/DISOSPMD-Sekr/II/2020/II

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : YESI GUSTINA
 NIM : 11627204103
 JURUSAN : ILMU HUKUM
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SUSKA RIAU
 JENJANG PENDIDIKAN : S 1
 ALAMAT : PEKANBARU
 JUDUL PENELITIAN : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PEMBATANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI".

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data yang diperlukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi guna penulisan Proposal Skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PEMBATANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 28 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Sosial,
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Kuantan Singingi

Drs. NAPISMAN
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740202 200003 1 005

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta



UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI KANTOR KEPALA DESA PEMBATANG

KECAMATAN PANGEAN

Jln. Ishak Gani No.01 Telp Kode Pos 29553

SURAT KETERANGAN NOMOR: 061/SK-PBT/VII/2020

Kepala desa Kematang kecamatan Pangean kabupaten Singingi, setelah membaca surat dari Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Kuantan Singingi nomor. 09/DPMPSTP-PNP/1.04.02.02/2020 tanggal 8 Januari 2020.

Dengan ini menerangkan:

Nama : Yesi Gustina
Nim : 11627204103
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PEMBATANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

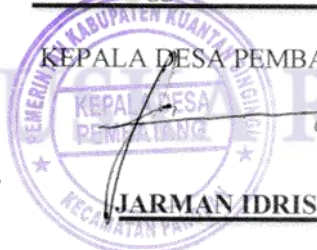
Adalah benar telah melakukan penelitian di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dari tanggal 16 S/D 25 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Pematang

Pada Tanggal: 26 Februari 2020

KEPALA DESA PEMBATANG



JARMAN IDRIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YESI GUSTINA
NIM : 11627204103
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA
PEMBATANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

Pembimbing : Lysa Angrayni, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Juli 2020,

di Pimpinan Redaksi

M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
NIP. 1988 0430 2019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb



Penulis bernama **YESI GUSTINA**. Penulis lahir dari orang tua, Ayahanda Darwis dan Ibunda Asniwati sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada tanggal 7 Agustus 1996. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 002 Desa Pematang, lulus pada tahun 2009, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) Hayatul Islamiah Desa Pematang, lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Benai Kabupaten Kuantan Singingi, dan lulus pada tahun 2015 dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.